



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

---

**Judul:** Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Desa Dan Pelestarian Lingkungan.

**Penulis:** Sajogyo

**Saran Pengutipan:** Sajogyo. (1985). "Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Desa Dan Pelestarian Lingkungan." Seminar Hari Pangan Sedunia V, Jakarta.

**Sumber:** Perpustakaan Sajogyo Institute

---

Digitalisasi dan penyebarluasan karya-karya Sajogyo ini merupakan bagian dari Peringatan Milad 100 Tahun Sajogyo (21 Mei 1926-21 Mei 2026) yang diselenggarakan atas kerja sama Sajogyo Institute dan IPB University.

Dokumen digital karya-karya Sajogyo dapat diakses dan diunduh melalui Repository IPB University (<https://repository.ipb.ac.id/>) dan tapak maya Sajogyo Institute (<https://sajogyo-institute.org/>).

PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DESA DAN  
PELESTARIAN LINGKUNGAN \*)

oleh Dr Sayogyo (Jalan Malabar 18 Bogor)

Abstract

In relating rural ~~life~~ "quality of life" and environmental quality one may focus on food as one basic need, in line with the seminar's theme. However, one has to remain in the framework of the "eight pathways of equity" in development in which employment opportunities are central, that will lead to higher income and food adequacy, according to ~~one's~~ <sup>nutri-</sup> ~~nutritional~~ needs of every household member.

In terms of employment, one needs a listing of population by occupation (economic activities) so that any project/program will have clear target groups and know how many of each to aim for.

The case of the "green revolution" (in rice) is mentioned as an example in which higher agricultural productivities have been achieved by means of a "high energy" system that can be sustained only with support of all involved, including farmers and farm labour. Several projects are mentioned that have been aimed at rural poor with its results however poorly reported so that no realistic evaluation has been possible. New efforts to develop a Nutrition Surveillance System in several provinces in Indonesia may be seen as efforts to monitor at local level the processes and results of rural uplift, esp. focussing on rural poor who in lean months have not enough work and income.

Three concrete cases are presented by way of examples in which realistic ways one may ~~in~~ help rural poor to improve their own lot. One case is on a rice-credit scheme at hamlet level (lumbung kampung) in which a government share ("matching") will help in maintaining a local ricestock for occasional lean months.

A second case is promoting more household industries in "tempe" (soyabean fermented cake) in villages, as a 1981 national survey has shown ~~that~~ that urban people consume more "tempe" (also with ~~rising~~ rising incomes) than rural people, due to better promotion of its product in urban areas, in the past even with soya imports.

A third case is that of homegarden intensification, esp. in villages with a good town market, to raise income levels of farmers with very restricted landbase. An integrated approach is needed as a homegarden has many functions and potentials (in contrast to past projects with individual targets) in which households in their neighbourhood blocks are induced to cooperate in renovation and later also in marketing of produce.

\*) untuk Seminar Hari Pangan Sedunia V, Jakarta tgl 17 Oktober '85

1. Dalam uraian ini (mengingat theme seminar) kita batasi arti "taraf hidup masyarakat" pada arti "kecukupan pangan dan gizi" tapi tetap dalam kaitan dengan delapan jalur pemerataan.

Ragam jalur pemerataan itu bermula (pangkal) dari "peluang berusaha (sebagai pengusaha) dan "peluang bekerja" (sebagai buruh upahan) ya masing-masing menentukan tingkat pendapatan pencari nafkah/rumah-tangga (golongan, masyarakat). Tingkat pendapatan rumah-tangga itu diharap mendukung daya beli untuk pangan yang diperlukan dalam jumlah dan mutu yang mencukupi bagi setiap anggotanya, juga bagi lapi yang berpenghasilan paling rendah.

Untuk membedakan peluang (3 jalur tsb di muka) yang terdapat antar beragam golongan, baik dipakai jenis pekerjaan utama (orang, rumah-tangga) sebagai dasar klasifikasi. Diantara lapisan petani lebih baik membuat perincian antara subgolongan berdasar luas mililahan, untuk perincian lebih lanjut, tak lain karena kita tahu ada sebagian petani yang berlahan sempit walau produsen pangan tapi terpaksa kita golongkan pada "konsumen", karena hasil sendiri jauh tak mencukupi keperluan sendiri untuk sepanjang tahun. Rumusan dalam Pola Umum Pglita IV (bab IV) menyebutkan "kelompok-kelompok masyarakat yang memunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang masih rendah, seperti buruntani, petani penggarap yang tidak memiliki tanah, petani pemilik tanah yang sangat kecil, nelayan, pengrajin dan sebagainya..." (butir 24, bagian Umum). Rumusan tsb mengingatkan kita untuk "lebih meningkatkan dan memperluas usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki penghasilan kelompok-kelompok masyarakat tsb".

Bagian lain dari butir yang sama juga menunjuk pada perlunya "...melanjutkan program-program yang memberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan memperkuat permodalan, meningkatkan keahlian dan kemampuannya, serta memperluas pemasaran."

Bahwa dalam rumusan tsb dibuat perbedaan antara dua golongan sasaran, menunjuk pada pengakuan bahwa "kelompok-kelompok masyarakat" (terbanyak terdapat di desa-desa di Jawa) adalah lapisan terbawah yang paling sulit keadaannya, sedangkan yang tersebut kemudian ("golongan ekonomi lemah") keadaannya tak separah golongan-golongan yang tersebut terdahulu. Bahkan secara konkret, dalam sikon di pedesaan Jawa, "golongan ekonomi lemah" itu adalah lapisan atas baik petani (berlahan cukup) maupun bukan-petani yang mulai tampil di tingkat kecamatan atau lebih luas.

tersebut  
dimuka

Dapat membedakan antara beragam golongan dan lapisan dalam masyarakat adalah penting, demi strategi yang tepat untuk mengenal golongan sasaran sesuatu program dan sampai mana dampak "antar-program" (tiap proyek dan program punya golongan-sasaran) yang dialami oleh tiap golongan/lapisan itu.

Dalam hubungan ini tak cukup kita "bermain" dengan satu dua "garis kemiskinan" ("berapa orang yang masih tergolong miskin pada suatu masa Pelita"), jika tak sekaligus menyebutkan "siapa mereka yang masih (terbanyak) tergolong "miskin", "miskin sekali", mencakup misalnya ukuran "kurang pangan". ~~Selain~~ Dalam hal ini perlu dicatat bahwa untuk pertama kali, hal ukuran "garis kemiskinan" itu sudah masuk dalam dokumen formal, yaitu dalam Lampiran pada Pidato Presiden dihadapan sidang MPR terakhir. ~~Orang~~ Orang tentu masih terus dapat memperdebatkan soal patokan untuk ukuran-ukuran pada beragam "garis kemiskinan" itu (~~Patokan B.P.S. yang dipatokkan.~~)

2. Arti "kecukupan pangan" terutama tertangkap dalam ukuran "kecukupan kalori" (untuk bekerja, dsb) dan jikapun "kecukupan protein" kita telaah sekaligus, cukup untuk gambaran garis besar, kita ~~telah~~ ~~sera~~ kecukupan makanan pokok serealialia (beras yang pokok, ditambah jagung dan terigu impor) dalam pola makanan Indonesia.

Jelas bahwa dalam perkembangan 20 tahun terakhir pembangunan pertanian kita, program penyediaan beras (dari Padi Sentra sampai beragam Bimas dan akhirnya Insus) yang tercatat paling berjasa dalam memperbaiki tingkat penyediaan pangan kita. Hal itu berkat perkembangan organisasi produksi yang makin tangguh dalam proses itu (walau dengan kekurangan-kekurangannya pada masa-masa tertentu) dan dukungan investasi modal yang cukup (a.l. dalam irigasi modern, pendirian pabrik pupuk, dsb) serta masukan teknologi unggul, hasil kerjasama internasional. Dan mesti disebut juga jasa petani yang jutaan yang menerima dan mampu menerapkan teknologi unggul itu. Saling-pengertian dan kerjasama erat antara petani dan penyuluh serta peneliti untuk masa depan kita makin nyata disyaratkan, sekali kita memilih pola pertanian modern pada tingkat pemakaian energi tinggi. Peningkatan lebih jauh produktivitas pertanian dalam proses itu (hasil per hektar per hari, sepanjang ada sinar matahari) minta syarat kewaspadaan dalam tingkat tinggi pula, dengan sistem pemantauan (monitoring) yang canggih. Sampai kini petani kita, dengan pendidikan rata-rata lulusan SD, mampu menunjang sistem itu. Bagaimana halnya pada tahap-tahap selanjutnya ?



peluang bekerja pada saat-saat tertentu (berakibat paceklik bagi segolongan orang di desa) ~~itu~~ secara teknis dapat diatasi, misalnya dengan merubah pola pertanian setempat, disitulah fungsi sektor Pertanian. Misalnya, memperkenalkan sistem "padi gogo-rancah" untuk mengganti sebagian sistem sawah tadah hujan atau padi ladang. (Ini terjadi di NTB). Atau memperkenalkan tanaman baru untuk pangan atau hasil uang yang dapat dibelikan pangan pokok, terutama untuk mengatasi ~~minggu~~ bulan-bulan paceklik di desa.

Beragam proyek padat karya di desa juga ~~seben~~ diberi fungsi yang memberi peluang tambahan sumber nafkah bagi sebagian orang yang terk masa sepi pekerjaan. Sayangnya bahwa <sup>dim</sup> jalur pelaporan program itu data nya belum dapat dipakai usaha pemantauan sampai mana lapisan pendu yang paling memerlukan peluang itu sudah tertolong, di lain pihak sampai mana hasil pekerjaan mereka telah membantu pelestarian prasarana "pekerjaan umum di desa", termasuk yang mampu mencegah tingkat erosi, misalnya di tanah usahatani lahan kering, apalagi di tanah berlereng.

Jika uraian di muka lebih ditunjukkan pada perlunya kita lebih cermat menetapkan golongan sasaran kita, juga perlunya pilihan <sup>tepat</sup> dan pelaporan data untuk dapat mengikuti proses perkembangan usaha kita membantu berbagai lapisan masyarakat di desa agar mampu bertindak, mengatasi masalah mereka sendiri, tak lain karena tanpa data tsb ~~itu~~ kita tak dapat mengevaluasi apa yang sudah diusahakan dengan banyak dana selama tiga kali Palita kita.

3. Apakah yang dapat kita usahakan agar khususnya lapisan bawah di pedesaan kita mampu meningkatkan tingkat hidup rumahtangga masing-masing, biarpun milik lahan sempit ?

Beberapa contoh disini diuraikan agar menunjuk pada usaha dan sasar konkrit, terbatas pada sikon masyarakat di ~~di~~ pedesaan Jawa, itupun mungkin terbatas pada sejumlah wilayah yang "memenuhi syarat".

Lagi pula, contoh-contoh itu dari bidang proyek/program yang bukan hal baru karena pernah dibina atau telah nyata mampu berkembang di tempat lain.

Tiga contoh itu adalah pengembangan lumbung kamoung/dukuh, industri rumahtangga (atau industri kecil) tempe/tahu dan peningkatan daya guna lahan pekarangan disekitar rumah.

~~itu~~ Ide menumbuhkan kembali lumbung desa, tapi dalam bentuk dan cakupan lebih kecil, meliputi satuan dukuh (bagian dari desa administratif) baru-baru ini dilontarkan oleh tokoh HKTI, sebagai tanggapan atas harga rendah gabah yang diperoleh petani, karena "petani tak ikut berusaha untuk ikut berperanan dalam pasaran gabah/beras".

Sebenarnya, peranan produsen petani dalam pasaran gabah itu sudah diusahakan penyalurannya lewat jalur koperasi KUD, tapi hal ini ~~tidak~~ <sup>banyak</sup> (agaknya) menunjukkan peranan petani sebagai objek dan KUD sebagai alat-perantara dari DOLOG (badan pemerintah). Memang ada petani bermodal yang mampu bermain sebagai "dalang" dibalik proses itu dan memperoleh keuntungan besar, sedangkan rata-rata petani lain menjadi korban, tak pernah mengecap "harga dasar" (ketetapan) pemerintah. Usaha membangun prasarana pascapanen (pengeringan, pergudang di tingkat KUD sudah mulai dibina oleh DOLOG, tapi proses alih teknologi itu masih jauh dari tuntas, terutama karena ~~penyakit~~ motivasi petani ~~banyak~~ yang langka.

Sampai mana petani produsen gabah akan mampu "bermain" dalam pasaran itu yang dikuasai oleh DOLOG? Dan mengapa bukan satuan KU itu yang diusahakan agar dapat dikuasai oleh petani, pengurusnya, sebaliknya lebih melihat suatu peluang bagi lumbung kampung/dukuh. Arti "lumbung" jika mengacu kepada pengalaman lama (sejak zaman kolonial) mengandung arti "simpan-pinjam", di zaman dulu dibawah pengendalian BRI, bank pemerintah yang melayani desa. Jika segi "ikut main" dalam pasaran gabah/beras di kampung/desa, kita serahkan pemikirannya pada rekan/peminat ahli bidang "business", dalam satu ~~hal lain~~ gagasan berikut, yang akan kami lebih perhatikan pada suatu lumbung kampung ~~sebagai~~ <sup>sebagai fungsi</sup> sebagai alat pendukung mengatasi masa paceklik bagi lapisan bawah di kampung/dukuh.

Yang menyimpan ke dalam lumbung itu adalah rumah tangga yang berkecukupan, sedangkan yang meminjam adalah rumah tangga lapisan bawah yang tak dapat menghindari suatu masa paceklik. Di luar lembaga lumbung kampung itu pertemuan antara dua pihak umumnya berakibat ikatan hutang, dimana si-lemah membayar kembali dengan tenaga atau tanpa dirasa, dengan bunga tinggi. Bidang transaksi ini sampai kini bebas dari sesuatu pengawasan dari luar desa, yang mampu membelah yang lebih lemah. Pertanyaan pokok: sampai mana zaman ini sikon di kampung (juga masih memungkinkan rumah tangga yang lebih kuat ("patron") rela menyalurkan sebagian hasilnya (modal) ke dalam lembaga lumbung tsb, dimana pengelolaan bersama akan berlaku, beda dari hubungan "bapak-dan-anak buah" dimana si-bapak lebih berkuasa? Pengurangan risiko dan tanggungan si-mampu dalam lembaga lumbung dapat dibantu jika pemerintah mampu menempatkan modalnya, tentu dalam bentuk gabah pula. Misalnya, untuk tiap kwintal gabah simpanan si-mampu, DOLOG (dengan perantaraan KUD) menyertakan satu kwintal pula. Dalam penyertaan modal seperti itu, pemerintah dapat membina sikon sehingga tingkat bunga pinjaman dapat dibuat serendah-rendahnya; dalam hal ini proses ~~yang~~ "lambat-laun" (misalnya 5 tahun) yang diikuti. Dapat diusahakan agar si-lemah yang pada mulanya tak menyertakan apa-apa, dalam proses

simpan-pinjam-angsur itu dapat dibina dalam menabung, biarpun dari sedikit ke sedikit.

Jika menyebut angk<sup>2</sup>angka, katakanlah di satu dukuh ada 150 rumahtangga dan dari lapisan atas ada 15 rumahtangga menyimpan satu ton gabah, dengan penyertaan satu ton oleh DOLOG (Pemerintah), lewat KI tersedia sejumlah dua ton di <sup>lumbung</sup> lumbung kampung itu. Ini cukup untuk membantu (pinjaman) 50 rumahtangga dari lapisan miskin selama dua bulan paceklik, dengan pinjaman rata-rata 40 kg/rumahtangga. Jika di sejumlah 50,000 dukuh di Jawa rata-rata tingkat penyertaan (simpanan) hanya setingkat satu ton gabah per dukuh, DOLOG hanya cukup menyertakan ("matching") dengan sebanyak 50.000 ton gabah. Penggabungan modal (gabah) penyertaan antara beberapa lumbung duk dapat dipersatukan atas prakarsa dan tanggungjawab bersama antara pengurus mereka, sehingga kelembagaan ini dapat tumbuh dari bawah. Dalam sistem seperti itu, dukungan lumbung desa atas usaha Kewaspadaan Pangan dan Gizi di tingkat desa, dapat menjadi nyata dan konkret. Bukan mustahil pula dari sumberdaya lokal itu ada yang dapat disediakan untuk sp suplemen makanan tambahan pada satuan Taman Gizi usaha kelompok ibu-ibu pengasuh anak balita. Proses membina keswadayaan lumbung desa itu juga dapat mempercepat Anyebarluasan teknologi tepatguna dalam pengamanan gabah (dan jenis pangan lain) dalam penyimpanan. (tehnologi pasca-panen), lebih cepat daripada jalur KUD, sering satuan antar-desa, lebih jauh dari ma dukuh.

4. Gagasan mengembangkan lebih meluas kerajinan pembuatan tempe (kedele) di masyarakat desa, bertumpu pada penemuan (data BPS, Susenas, 1981) bahwa rata-rata penduduk kota makan tempe lebih banyak dari penduduk desa; makin kaya rumahtangga, makin banyak makan temp biarpun sudah mampu mengkonsumsi lebih banyak pangan hewani sebagai sumber protein.

Dibalik gejala itu, dapat ditunjuk pendorong pada pihak produsen tempe (dan tahu) di kota, dimana bahkan tampak unsur pemanjaan mereka oleh pihak pemerintah (BULOG), <sup>pemanjaan</sup> konsumen di kota umumnya. (Kasus impor terigu merupakan tanda lain!) Dalam hal penyediaan bahan baku kedele, di waktu yang lalu BULOG telah membantu dalam peng-imporannya dari luar negeri, tanpa ada usaha itu menyambung pada dorongan peningkatan produksi kedele oleh petani kita.

Proses penyebaran konsumsi tempe itu memang akan lebih lancar harga relatif kedele makin rendah karena produksi yang melimpah!

Penyediaan varietas unggul, disertai pemakaian kapur dan rizobium merupakan usaha awal menjelang revolusi benih unggul dalam hal kedele. Sampai mana dorongan dari pihak pengusaha ternak yang memerlukan bahan jagung dan kedele untuk membuat pakan ternak melimpah dan lebih murah, dapat mempercepat revolusi palawija (khususnya di lahan kering) ?

Walaupun dalam hal ini ada sedikit kekhawatiran penyediaan kedele yang melimpah akan juga membuat lain-lain kacang-kacangan yang dikonsumsi petani setempat, menjadi makin langka (diversifikasi dalam sumberdaya tsb berkurang), desakan dari pihak peternak (dan konsumen di kota yang makin banyak memang menyukai daging ayam dan susu sapi) di masa depan yang dekat kiranya tak dapat dibendung.

Sebelum kedele melimpah di desa, di daerah-daerah tertentu masyarakat desa di Jawa ada yang sudah biasa membuat tempe dari buah kecipir, kara benguk, bahkan biji-bijian lamtoro. Pohon lamtorogung juga mampu menjadi sumberdaya biji-bijian untuk tempe (bahkan dengan lebih sedikit risiko "keguguran rambut" karena kandungan suatu zat kimia) walau lebih cacak memberi nama "tempe orang miskin".

Sampai mana pengenalan dan pembinaan "industri rumah tangga" tempe kedele di pedesaan kita dapat diusahakan pada prioritas lebih tinggi, sedangkan yang berbentuk "industri kecil" tempe lebih terbatas, misalnya di ibukota Kecamatan ?

Walaupun yang tersebut terakhir lebih efisien, memajukan "kerajinan tempe" lebih mendukung pemerataan. Dilema serupa dihadapi dalam usaha peternakan ayam, dengan pembatasan maximum 5000ekor per pengusaha kecil, jauh dibawah tingkat efisiensi yang dapat dicapai.

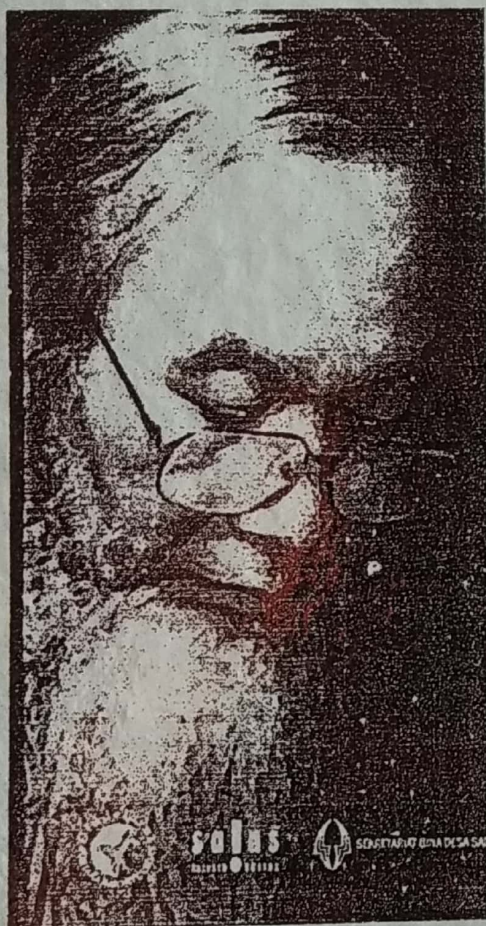
5. Studi pekarangan (sebagai satu cabang usahatani) yang makan waktu setahun lebih dilakukan di sekitar tahun 1972, di satu desa di Rondonprogo, DIY oleh Stoler (anthropologi) dan satu desa lain di Bantul, DIY oleh Penny/Ginting (ekonomi pertanian).

Stoler menemukan bahwa makin luas sawah, makin luas pula pekarangan petani. Petani dengan kurang dari 0.2 ha sawah, tak dapat mencukupi keperluan beras sendiri. Makin sempit pekarangan, makin intensif diusahakan, dengan curahan jam kerja lebih tinggi, walau imbalan per jam kerja makin rendah. Bagi kebanyakan petani hasil pekarangan melebihi hasil sawah.

Begitu pula Penny/Ginting menemukan penghasilan pekarangan yang (per hektar) jauh lebih tinggi dari hasil sawah. (Tabel 1 dan 2)

Kepustakaan

- Hayami, Y. and M.Kikuchi: Asian Village Economy at the Cross Roads: an Economic Approach to Institutional Change Tokyo, 1981;
- Penny, D.H. dan M. Ginting: Pekarangan, Petani dan Kemiskinan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984;
- Stoler, A.: Description of Research on D Garden Cultivation in Two Javanese Villages, 1973 (stensilan);
- Garden Use and Household Consumption Patterns in a Javanese Village (1975, draft stensilan, 91 hal.);
- Sayogyo : Pola Produksi dan Konsumsi Hasil Hortikultura (makalah di Kongres Hortikultura Nasional I, Malang, Desember 1981);
- Sayogyo : Tempe di dalam Pola Makanan Indonesia, Tahun 1981 (makalah di Simposium Pemanfaatan Tempe, Jakarta, April 1985);
- Sayogyo : Prospek Tanaman Pekarangan Dalam Peningkatan Pendapatan dan Status Gizi Masyarakat (makalah di Seminar "Peninggunaan Lahan Pekarangan", Akademi Gizi, Jakarta, Juni



---

# PROF. SAJOGYO

---

KUMPULAN TULISAN  
BAGIAN III

---

KOLEKSI KHUSUS  
PERPUSTAKAAN SAINS

---